

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 2017, terjadi krisis diplomatik di antara anggota GCC (*Gulf Cooperation Council*) tepatnya antara Arab Saudi bersama sekutu regionalnya, yaitu Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman dengan Qatar. Krisis tersebut menyebabkan Arab Saudi dan negara-negara sekutunya memutuskan untuk memblokade Qatar, penyebab dari blokade ini karena perbedaan prioritas, kepentingan, dan pandangan politik antara Qatar dengan negara-negara tetangganya tersebut. Dalam hal ini Arab Saudi menuduh dan meminta Qatar untuk berhenti mendukung Iran dan Turki, serta menghentikan dukungan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap teroris oleh Arab Saudi beserta sekutu (Vakil, 2018).

Secara historis perseteruan antara negara di kawasan Teluk dengan Qatar bukanlah sesuatu hal yang baru. Arab Saudi sebagai aktor utama di Kawasan ini memiliki historis konflik yang panjang dengan Qatar. Misalnya pada tahun 2002 Arab Saudi melakukan penarikan duta besar mereka dari Qatar atas dugaan sikap kritis Al Jazeera yang merupakan media konglomerat yang didanai oleh Qatar terhadap Arab Saudi. Pada tahun 2014, Bahrain, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab melakukan penarikan duta besar mereka di Qatar dengan alasan campur tangan dengan urusan dalam negeri mereka (Roberts, 2017).

Tindakan blokade oleh Arab Saudi bersama dengan negara aliansinya terhadap Qatar ini dikhawatirkan bisa menjadi kemunduran besar untuk Qatar. Apalagi, Qatar dikenal memiliki kebijakan luar negeri di regional Timur Tengah yang cukup ambisius, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial (Ayoub Meo, Mahesar, Sheikh, Sattar, & Bukhari, 2016). Qatar seringkali memiliki peran dalam melakukan mediasi konflik regional, serta memiliki peran

diplomasi dan militer yang besar dalam masalah-masalah utama internasional. Sebagai contoh, menurut Nuruzzaman (2018), pada tahun 2011, Qatar menarik perhatian regional dan global dengan berpartisipasi langsung dalam serangan udara yang dipimpin NATO dalam operasi menghancurkan rezim Gaddafi di Libya. (Nuruzzaman, 2015).

Namun perlu diketahui bahwa ambisi dan upaya peningkatan pengaruh Qatar dalam skala regional maupun global seringkali menuai kritikan oleh negara-negara teluk lainnya, khususnya Arab Saudi. Adanya blokade dan embargo oleh Arab Saudi dan sekutu terhadap Qatar dikhawatirkan bisa melemahkan ekonomi Doha. Namun, hingga saat ini Qatar relatif masih tetap bisa mempertahankan kekuatan ekonomi maupun keamanannya, meskipun tengah mengalami blokade dari negara sekitar. Sejak awal blokade dilakukan, tidak ada aksi ataupun serangan militer, sehingga Qatar cenderung terfokus pada permasalahan ekonomi.

Hampir tiga tahun setelah Arab Saudi beserta aliansinya memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar serta memberlakukan blokade darat, udara, dan laut, krisis Teluk tampak menunjukkan sedikit tanda-tanda peluang untuk resolusi konflik. Terdapat beberapa negara berupaya berkontribusi melakukan mediasi konflik diantaranya adalah Kuwait, Turki, dan Indonesia. Turki lewat Presiden Erdogan dan Indonesia lewat Presiden Jokowi satu suara untuk mendorong Qatar dan negara Teluk Arab menyelesaikan persoalan politik ini dengan jalan berdialog. Diantara tiga negara tersebut, Kuwait merupakan yang paling intens berkontribusi mendorong terciptanya resolusi konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

Kuwait selama ini diketahui menjadi negara mediator dalam mendamaikan atau meleraikan pihak-pihak yang berkonflik di Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Arab Saudi dan Negara Teluk (Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman dan dua negara lainnya) mengambil langkah tegas dengan melakukan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar setelah negara itu disinyalir mendukung kelompok terorisme dan menjalin hubungan yang cukup mesra dengan Iran. Bersama dengan Amerika Serikat, Kuwait melihat bahwa kestabilan dari kawasan Teluk merupakan salah satu hal yang harus dijaga dikarenakan banyaknya konflik yang terjadi di kawasan tersebut (Patrick Wintour, 2017). Kuwait, tidak seperti Negara Teluk lainnya, memilih untuk menjaga hubungan diplomatik dengan Qatar dan di saat yang bersamaan memilih untuk menjadi aktor yang memediasi konflik antar-Negara Teluk tersebut (Natasha Turak, 2018). Ada beberapa penelitian yang pernah menganalisis konflik blokade Qatar oleh Arab Saudi, diantaranya adalah sebagai berikut:

Octaviarie (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Alasan Kebijakan Arab Saudi Melakukan Blokade Terhadap Qatar” menyimpulkan bahwa terdapat aspek struktur dan identitas dibalik tindakan blokade Arab Saudi beserta aliansinya terhadap Qatar. Ada perbedaan identitas ideologi di antara mereka, yaitu: Qatar memiliki kedekatan dengan organisasi teroris yaitu Ikhwanul Muslimin dan Iran yang menyebarkan revolusi Islam. Hal inilah yang menjadi pemicu utama Arab Saudi beserta aliansinya melakukan tindakan blokade.

Turmudzi (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kebijakan Blokade Qatar Ditinjau Dari Perspektif *Decision Making*” menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi Arab Saudi melakukan blokade terhadap Qatar. Faktor tersebut terdiri atas faktor nasional dan faktor internasional. Faktor nasional dari Arab Saudi yaitu: (1) ketidaksukaan para pemimpin politik dalam negeri Arab Saudi terhadap pemimpin Qatar; dan (2) adanya alasan historis di mana Arab Saudi melihat Qatar sebagai negara yang berpotensi menjadi ancaman. Dendam masa lalu oleh Arab Saudi terhadap Qatar karena melihat transformasi mereka dari yang dianggap sebagai *vassal state* menjadi negara yang cukup kuat di regional membuat para pemimpin politik dalam negeri Arab Saudi cemas karena dapat mengganggu hegemoni kekuasaan Arab Saudi di kawasan. Serta ketidaksukaan Kerajaan Arab Saudi terhadap kepemimpinan Qatar oleh Khalifa Al Thani yang bersebarangan cara politik dengan negara-negara GCC dan Arab Saudi. Hal ini dianggap sebagai faktor pendorong yang cukup kuat dikarenakan Arab Saudi melihat diri mereka adalah pemimpin kawasan Teluk, dan untuk suatu negara melawan kepentingannya merupakan salah satu bentuk ancaman bagi Arab Saudi itu sendiri. Sedangkan untuk Faktor internasional dari keputusan Arab Saudi memblokade adalah: (1) persaingan kekuasaan dengan Iran, yang merupakan poros lain di kawasan Timur Tengah; (2) Diberikannya bantuan kepada Ikhwanul Muslimin oleh Qatar, yang merupakan organisasi islam yang dianggap ancaman oleh Arab Saudi; dan (3) Dukungan dari negara-negara sekutu Arab Saudi. Hubungan baik antara Qatar dan Iran dianggap sebagai ancaman karena posisi perpolitikan di Timur Tengah menempatkan Arab Saudi berlawanan dengan Iran, sehingga kedekatan antar-keduanya dianggap dapat mengganggu hegemoni Arab Saudi di kawasan. Lalu, kedekatan dan kucuran dana Qatar ke organisasi Ikhwanul Muslimin dianggap ancaman karena Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang berhasil menggulingkan kepemimpinan di Mesir sehingga Arab Saudi takut pengaruh tersebut menyebar ke negaranya Serta yang terakhir terdapat dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab, serta Bahrain dalam kebijakan blokade memperlihatkan bahwa posisi Arab Saudi untuk

memblokade bukan kebijakan yang hanya mementingkan negara sendiri, namun juga mengambil pandangan dari negara-negara sekutunya.

Kinninmont dalam penelitiannya yang berjudul “*The Gulf Divided: The Impact of Qatar Crisis*” menyimpulkan bahwa konflik yang terjadi di Teluk sangat dinamis dikarenakan salah satu faktor pendorong yang dapat menyelesaikan konflik hanyalah terdapat di tangan para pemimpin politik. Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa resolusi konflik mungkin tercapai dilihat dari beberapa prospek seperti: dorongan Amerika Serikat, dorongan ekonomi, ataupun *external shock* yang memaksa GCC untuk bekerja sama dan menyampingkan konflik yang ada (Kinninmont, 2019).

Köse dan Ulutaş dalam tulisannya yang berjudul “*Regional Implications of the Qatar Crisis: Increasing Vulnerabilities*” menyimpulkan bahwa konflik di kawasan Teluk semakin memanas sesaat setelah Arab Spring, di mana terdapat perang ideologis antara negara anggota GCC yang pro-perubahan dengan mereka yang pro-status quo. Selain itu konflik Teluk tidak hanya terjadi antar-negara anggota, tetapi juga dengan negara di kawasan Timur Tengah lainnya seperti Iran, serta permasalahan horizontal yang berbentuk sektarian antara sesama negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam (Köse & Ulutas, 2017).

Penelitian-penelitian di atas lebih menekankan pada penyebab Arab Saudi melakukan blokade terhadap Qatar. Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus kepada upaya penyelesaian konflik, dan bukan konflik antara Qatar oleh Arab Saudi itu sendiri. Qatar dan Arab Saudi, kedua-duanya merupakan anggota GCC. Mereka memiliki identitas yang sama, yakni sebagai negara Islam dan hidup dalam wilayah yang sama yaitu, Timur Tengah. Jadi sangat mungkin diperoleh penyelesaian konflik sehingga mereka dapat hidup berdamai. Kuwait merupakan salah satu pihak yang begitu gencar terlibat dalam upaya menyelesaikan konflik. Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang kontribusi Kuwait dalam upaya resolusi konflik antara Qatar oleh Arab Saudi.

Selama berlangsungnya konflik antara Qatar dengan Arab Saudi, Kuwait memang diketahui aktif berperan sebagai mediator yang berusaha untuk mempertemukan kedua negara yang berseteru tersebut. Di dalam hal ini, Kuwait memegang peranan sebagai *small state mediator*. Bahkan peran Kuwait sebagai *small state mediator* dianggap lebih signifikan dibandingkan peran negara adidaya, seperti Amerika Serikat (Farhat 2020) terhadap resolusi konflik Qatar dan Arab Saudi. Akan lebih menarik untuk mempelajari dengan lebih mendalam mengenai peran Kuwait di dalam penyelesaian konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian di atas, rumusan masalah yang akan coba dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa kontribusi Kuwait sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi?
- b. Mengapa Kuwait berkontribusi untuk memediasi konflik antara Qatar dengan Arab Saudi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis kontribusi Kuwait sebagai mediator dalam konflik Qatar dan Arab Saudi?
- b. Untuk menganalisis penyebab Kuwait berkontribusi untuk memediasi konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini mampu bermanfaat dalam dua aspek yaitu secara akademis dan praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan akademik di bidang hubungan internasional. terutama berkaitan dengan alasan suatu aktor hubungan internasional dalam menyelesaikan konflik antar-negara yang tidak secara langsung berkaitan dengannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada peneliti mengenai problematika kawasan Timur Tengah sekaligus dapat mengantarkan peneliti untuk menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Diponegoro.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Decision Making Theory

Penulis menggunakan *Decision Making Theory* atau teori pengambilan keputusan sebagai salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis. *Decision Making Theory* bertitik tolak pada proses membandingkan dan memilih sekumpulan alternatif yang direncanakan, hal yang menjadi pertimbangan berlandaskan pada semua kegiatan di mana orang mencoba untuk menentukan tujuan dari pelaku, jika di aspek politik *decision making* dioperasionalkan sebagai penggambaran untuk negara dalam membuat kebijakan (Xing, 2015).

Disisi lain *decision making theory* memiliki lingkup baik dari segi sistem domestik (internal) dan sistem internasional (eksternal) yang menjadi pertimbangan suatu negara dalam membuat suatu kebijakan. Adanya faktor internal dan eksternal setidaknya membentuk preferensi negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Faktor internal bertitik tolak pada hubungan antara masyarakat dengan negara, sedangkan faktor eksternal bertitik tolak pada aspek dan struktur internasional seperti relasi dengan negara lain serta kondisi *global politics* (Synder, Bruck, & Sapin, 1962).

Dimensi dari faktor internal misalnya seperti cara masyarakat diorganisasikan dan berfungsi, politik domestik, opini publik, sikap publik, posisi geografis hingga kekuatan nasional. Sedangkan untuk dimensi faktor eksternal merupakan kondisi di luar wilayah negara tersebut seperti aksi dan reaksi dari negara lain hingga reaksi negara lain (Kurniawan, 2017).

Misalnya dalam politik domestik, salah satu yang berperan dalam memberikan kontribusi adalah peran dari partai politik yang memang terlibat aktif dalam segala pengambilan kebijakan yang ada suatu negara. Tapi tak jarang jika partai politik sendiri juga memiliki tujuan pribadinya seperti untuk meraih jabatan yang ada, sehingga mereka pada akhirnya mendukung isu-isu tertentu (Xing, 2015). Dalam kasus Kuwait, peran partai politik memang tidak begitu terlihat mengingat sistem dari Kuwait sendiri monarki dimana kerajaan berperan dominan dalam pengambilan kebijakannya.

Berikutnya adalah opini publik. Aspek opini publik digunakan dalam sistem demokrasi dimana kebebasan berkespresi merupakan aturan riil dalam negara demokrasi. Tak jarang bahwa opini publik yang sengaja diarahkan dan diinginkan akan membentuk sistem informasi yang keliru (Kafarneh, 2013). Biasanya opini publik hadir melalui media-media yang ada. Opini yang diproduksi oleh media inilah yang akan menjadi pertimbangan dari suatu negara dalam pengambilan keputusannya.

Sikap public dalam pengambilan keputusan juga memainkan peran positif sebagai salah satu faktor yang mencolok, menunjukkan penerimaan kebijakan nasional dan internasional. Sikap publik adalah proses stimulan individu atau kelompok terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang menentang kebijakan pemerintah akan mengeluh, bahkan mereka turun ke jalan atau mengadakan protes. Hal ini untuk menekan pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang ditetapkan. Selain itu, proses pengambilan keputusan politik dipengaruhi oleh lingkungan dan letak geografis. Letak geografis suatu negara terdapat dalam batas-batas geopolitik dimana suatu negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap politik di negara lain (Xing, 2015). Misalnya apabila Negara X menetapkan kebijakan mengenai masalah tertentu, maka kebijakan negara X dapat mempengaruhi negara Y untuk merespon masalah tersebut. Hal ini lah yang setidaknya coba dilakukan Kuwait dalam memberikan kontribusi dalam penyelesaian konflik antara Arab Saudi dan Qatar.

Berikutnya adalah faktor eksternal, yakni kondisi yang ada di luar wilayah negara lain, seperti tindakan dan tanggapan negara lain, atau campur tangan organisasi internasional atau regional. Faktor eksternal menyangkut hubungan antara negara dalam sistem internasional dan negara sebagai subjek dari proses pengambilan keputusan. Perilaku nasional dalam tataran internasional didominasi oleh *national interest* (kepentingan nasional). Secara internasional, terdapat negara-negara lain bahkan organisasi internasional yang dapat memberikan tekanan pada negara di tingkat internasional (Kamps, 2005). Dalam kaitannya dengan keterlibatan Kuwait, seperti di ketahui bahwasanya negara-negara yang ada di Timur Tengah acap kali menjalin kerjasama demi membangun ekonomi negara masing-masing. Bahkan lebih lanjut, Kuwait dan Arab Saudi sendiri juga sering menjalin kerjasama perihal produksi minyak dunia dengan negara timur tengah lainnya. Adanya konflik antara Arab Saudi dengan Qatar ditakutkannya akan mengganggu tingkat kestabilan hubungan ataupun kerjasama yang akan terjadi. Aspek keamanan kawasan pun juga akan ikut terganggu. Dari beberapa pilihan yang ada khususnya faktor eksternalnya, Kuwait pada akhirnya memposisikan diri sebagai mediator yang memediasi pertikaian antara Arab Saudi dengan Qatar.

1.5.2 Resolusi Konflik

Resolusi konflik sendiri dapat diartikan sebagai salah satu upaya untuk memilih menghindari dan meminimalisir konflik bisa melalui pencegahan konflik hingga penyelesaian konflik secara damai. Jika diasumsikan bahwa konflik bisa menjadi penyebab perubahan pribadi dan sosial yang positif, hadirnya resolusi konflik menitikberatkan pada aspek

pengecanaan, penurunan, berhenti, atau mengubah konflik kekerasan menggunakan metode damai (Miall, Romsbotham, & Woodhouse, 1999).

Setidaknya ada beberapa pendekatan dalam menelaah resolusi konflik. *Pertama*, resolusi konflik menyelidiki faktor struktural dan kognitif yang mempengaruhi sistem konflik. Pihak-pihak yang berkonflik membangun kesadaran dan mempertimbangkan bagaimana berinteraksi dengan lawan. Kedua, hal tersebut memandang konflik sosial dan teknik resolusi konflik sebagai proses dinamis dalam konteks keterlibatan pihak ketiga dalam transisi konflik. Ketiga, semua pihak saling terkait dan mempengaruhi konflik, utamanya bagaimana pihak ketiga memberikan pengaruh terhadap proses konflik (Sandole, Byrne, Staroste, & Senehi, 2009).

Pada dasarnya memang resolusi konflik bertujuan untuk mereduksi atau menghilangkan penyebab konflik. Resolusi konflik memiliki pendekatan untuk menyelesaikan konfliknya seperti; negosiasi untuk berdiplomasi, mediasi ataupun arbitrase, adjudikasi, konsiliasi konflik, manajemen konflik atau transformasi konflik, hingga pemulihan keadilan untuk mewujudkan perdamaian.

Salah satu aspek resolusi konflik adalah mediasi. Mediasi merupakan sebuah proses yang memerlukan pihak atau aktor ketiga yang bersifat tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berkonflik (Honeymoon & Yanawanarajah, 2003). Adanya kehadiran mediator setidaknya akan memberikan ruang untuk saling berkomunikasi bagi pihak yang bersengketa yang fokus pada masalah aktual dari perselisihan dan menemukan hasil yang diinginkan bersama untuk semua pihak yang terlibat dalam upaya penyelesaian perselisihan (Vestergaard, 2011).

Mediasi dapat memperluas negosiasi untuk menggambarkan kelompok yang berbeda, kemungkinan yang berbeda, dan kondisi yang berbeda (Sandole, Byrne, Staroste, & Senehi, 2009). Dalam proses mediasi inilah, kedua belah pihak mempertimbangkan opsi dan merundingkan perselisihan yang perlu diselesaikan untuk mencapai kesepakatan dengan bertukar penawaran dan kesepakatan.

Dalam penelitian ini, Kuwait menjadi pihak ketiga yang membantu memediasi antara konflik Qatar dan Arab Saudi. Tentunya sebagai pihak ketiga, posisi Kuwait haruslah netral dan tidak memihak salah satu pihak.

1.5.3 Penelitian Terdahulu

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Kuwait merupakan aktor yang membantu memediasi pihak-pihak yang berkonflik (Qatar & Arab Saudi serta aliansinya). Oleh karena itu, berikut ini disajikan tabel penelitian-penelitian terdahulu atau sebelumnya yang mengkaji Kuwait sebagai mediator konflik.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Abdulahdi Alajmi (2018)	The Gulf Crisis: An Insight into Kuwait's Mediation Efforts	Upaya mediasi Kuwait tampaknya bertumpu pada warisan sejarahnya yang mengakar dan mantap. Di samping struktur kewenangan dan sistem politik yang tetap kuat sejak awal berdirinya hingga saat ini. Ini terbukti dari peran aktif Kuwait dan kehadirannya yang berpengaruh di beberapa isu internasional, regional, dan Arab. Kuwait aktif di level diplomatik selama beberapa dekade yang bertepatan dengan pendirian dan kemunculan emirat itu sendiri. Visi Kuwait untuk mediasi dalam upaya politik luar negeri tetap sama selama berabad-abad. Sifat mediasi ini terikat pada kemampuan sistem politik saat ini dan warisan sejarahnya dan apa yang ditawarkan, secara tidak memihak, untuk semua pihak yang berkonflik. Keberhasilan upaya Kuwait sebagai mediator

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
			<p>dalam konflik Qatar-Arab Saudi ditentukan oleh 2 faktor, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengurangi atau menetralkan tuntutan yang mempengaruhi kedaulatan dan memaksakan perwalian pada pihak manapun. 2) Kemampuan mediator untuk mempertahankan dan menopang dirinya berdasarkan pertimbangan realistis bergantung pada fleksibilitas situasi dan pengalaman sejarah.
2.	Mohammad Naser (2017)	Kuwait's Foreign Policy towards Regional Issues in the Middle East from 2003 to 2014	<p>Secara regional, Kuwait memiliki politik luar negeri yang unik yang bercirikan netralitas. Hal ini pula yang membuat mediasi merupakan salah satu alat aktivasi kebijakan luar negeri. Pendekatan sistematis kemampuan finansial Kuwait memberikan kekuatan, pengaruh dan kredibilitas untuk berperan sebagai mediator dalam konflik regional guna mengurangi ketegangan antara dunia Arab dan Timur Tengah. Peran ini sendiri meningkatkan kredibilitas Kuwait sebagai negara "sentral" dalam politik Arab. Peran Kuwait adalah sebagai tanggapan atas</p>

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
			<p>panggilan dari luar negeri atau sebagai inisiatif yang diambil oleh Kuwait sendiri. Peran ini dapat dijelaskan dengan "banyak yang mengharapkan Kuwait memiliki peran mediasi dalam banyak masalah dan konflik di kawasan". Kuwait tahu bahwa perdamaian dan kerja sama di antara bangsa-bangsa dan rakyat dunia bukan hanya salah satu makna kebaikan yang melekat pada orang-orang Muslim Arabnya, tetapi juga untuk urgensi pragmatis dan alasan geopolitik yang jelas. Ujian mediasi Kuwait yang pertama terjadi pada pertengahan 1960-an ketika pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik diselenggarakan untuk "Republik dan Royalis" di Yaman dengan kehadiran Mesir dan Arab Saudi, dan meskipun hasil dari pertemuan tersebut tidak meyakinkan, Putra Mahkota dan Perdana Menteri Sheikh Sabah Al-Salem mengunjungi Riyadh pada bulan Juni 1965 dan mengadakan pembicaraan dengan Raja Faisal untuk menemukan cara untuk</p>

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
			<p>menyelesaikan masalah Yaman. Pada tahun 1968, Kuwait melakukan intervensi dan menciptakan iklim yang kondusif untuk menyelesaikan masalah klaim Iran atas Bahrain, dan beberapa pertemuan diadakan antara perwakilan pemerintah Teheran dan Bahrain di markas besar perwakilan Kuwait di Jenewa sebelum para pihak setuju untuk hadir.</p>
3.	Abdullah R. Al Saleh (2009)	Conflict Analysis: Exploring the Role of Kuwait in Mediation in the Middle East	<p>Syekh Sabah sebagai Emir Kuwait telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap yang dengan hati-hati bergerak di antara para pemimpin di negara lain untuk meredakan situasi yang dapat mengacaukan kawasan. Dia sangat sabar dan berhasil menjaga jalur komunikasi tetap terbuka di antara para pihak, bahkan ketika tidak ada solusi yang jelas dapat ditemukan. Sepak terjang Syekh Sabah sebagai mediator menunjukkan bahwa jika orang terus bekerja sama dalam subjek apa pun dan membangun kepercayaan diri dan niat baik, pada akhirnya solusi akan ditemukan bahkan untuk masalah</p>

No.	Penulis (Tahun)	Judul	Hasil
			<p>yang tampaknya tak terpecahkan. Contohnya: Situasi di Lebanon menjadi salah satu masalah yang tak terpecahkan. Perang saudara berlangsung selama bertahun-tahun. Jumlah faksi yang terlibat dalam jumlah besar dan tidak stabil membuat sangat sulit untuk mengatur kesepakatan apa pun untuk menghentikan penembakan. Pemerintah yang sah dibubarkan dan tidak mampu mengendalikan sejumlah besar faksi dan beberapa anggota penting terbunuh dalam pertempuran. Namun, Syekh Sabah terus bertemu secara berkala dengan para pemimpin berbagai faksi serta anggota pemerintahan yang sah. Dia terus mendorong semua pihak untuk menemukan solusi damai untuk masalah yang mereka hadapi dengan merombak representasi pemerintah agar lebih mencerminkan persentase penduduk yang sebenarnya dan untuk meminimalkan kerusakan.</p>

Sumber: Alajmi (2018: 547-548), Naser (2017: 104), & Saleh (2009: 69-70)

1.6 Hipotesis

Kuwait berkepentingan untuk menjadi mediator konflik antara Qatar dengan Arab Saudi didasarkan pada dua kepentingan, yakni internal maupun external. Secara internal, kepentingan

Kuwait menjadi mediator adalah untuk melindungi kepentingan nasionalnya dimana dalam hal ini adalah kepentingan ekonomi. Qatar adalah negara yang kaya akan energi. Tindakan blokade oleh Arab Saudi beserta aliansinya terhadap Qatar mempengaruhi stabilitas ekonomi di kawasan teluk termasuk ekonomi Kuwait. Sedangkan secara external, kepentingan yang mendorong Kuwait adalah terciptanya kestabilan kawasan Teluk serta untuk menjaga stabilitas hubungan diplomatiknya dengan Qatar.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Koseptual

a. Blokade

Blokade dapat didefinisikan sebagai salah bentuk perang tetapi menggunakan tekanan pada bidang ekonomi. Blokade berasal dari istilah militer, yakni operasi militer secara agresif yang bertujuan untuk mencegah kapal atau pesawat terbang atau transportasi apapun dari udara, laut dan darat dari semua negara musuh ataupun negara netral, untuk memasuki ataupun keluar dari zona tertentu saat berada di bawah kendali suatu aktor Negara (Drew, 2012).

b. Konflik

Konflik (*conflict*) secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu *configere* yang mempunyai arti saling bertengkar atau memukul. Menurut Antonius (2002: 175), konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang mempunyai akibat mencegah, membatasi atau mencampuri pihak lain yang dapat timbul antar kelompok dalam masyarakat atau dalam hubungan antar individu (Antonius, 2002). Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh Deutsch (salah satu tokoh bidang resolusi konflik), bahwa dalam konflik, interaksi sosial antar individu atau kelompok lebih dipicu oleh perbedaan daripada oleh persamaan. Oleh karena itu mengakibatkan adanya suatu benturan karena adanya hal-hal yang berseberangan.

Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau percaya bahwa mereka memiliki tujuan yang tidak sejalan (Fisher, 2001). Konflik mengacu pada perjuangan terselubung antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat ataupun negara-bangsa. Hal ini mungkin terjadi antara dua orang atau lebih, gerakan sosial, kelompok kepentingan, kelas, gender, organisasi, partai politik, etnis, ras, atau perkumpulan keagamaan (Tholkah, 2001). Webster dalam (Pruitt & Jeffery, 2009: 9) menyebutkan bahwa istilah "*conflict*" berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan (Pruitt & Rubin, 2009).

Berangkat dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik merupakan interaksi sosial antar satu pihak dengan pihak lain (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan.

c. Resolusi Konflik

Resolusi konflik dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *conflict resolution* memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan.

Menurut pendapat Nicholson (Nicholson, 1991:59) “*conflict resolution is the process facilitating a solution where the actors no longer feel the need to indulge in conflict activity and feel that the distribution of benefits in social system is acceptable*”. Berdasarkan definisi Nicholson, resolusi konflik dapat dipahami sebagai sarana untuk menciptakan proses untuk menyelesaikan berbagai dampak konflik. Resolusi konflik adalah proses berusaha untuk mengurangi atau menyelesaikan suatu konflik.

Fisher (2001:7) menyebutkan bahwa resolusi konflik adalah upaya untuk mengatasi penyebab konflik dan membangun hubungan baru yang tahan lama antara kelompok-kelompok yang terlibat. Mindes (2006: 24) menyebutkan bahwa resolusi konflik merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan perbedaan dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan serta keahlian untuk bernegosiasi, kompromi, dan mengembangkan rasa keadilan dalam pihak-pihak yang berseteru.

Resolusi konflik adalah segala upaya untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan di berbagai bidang kehidupan manusia. Seperti yang dikatakan Mior bahwa penyelesaian sengketa adalah istilah holistik yang berarti menangani dan menyelesaikan akar penyebab sengketa (Miall, Romsbotham, & Woodhouse, 1999).

Berangkat dari uraian tersebut, dapat ditarik bahwa pada dasarnya resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab terjadinya permusuhan dan berusaha menyelesaikan permusuhan tersebut dengan membangun hubungan baru yang tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau aktor-aktor yang berselisih.

1.7.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional
1.	Blokade	<p>Bentuk perang menggunakan tekanan perekonomian dengan cara mencegah kapal atau pesawat terbang atau transportasi apapun dari udara, laut dan darat dari semua negara musuh ataupun negara netral. Mereka dilarang memasuki ataupun keluar dari zona tersebut saat berada di bawah kendali suatu aktor negara. Tujuan utama dari blokade adalah membuat perekonomian negara yang diblokade lumpuh, sehingga segala bentuk aspek perdagangan akan mengalami hambatan saat suatu negara sedang di blokade. Adapun ciri-ciri tindakan blockade adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tindakan blokade biasanya pada pembatasan terhadap ekonomi negara.b. Pembatasan wilayah teritorial darat, laut dan udara terhadap negara yang di blokade, misalnya pemblokadean jalur laut biasanya kapal-kapal negara yang memblokade ditempatkan agak jauh dari pantai, sehingga dalam blokade tidak ada bentuk kontak senjata.

No.	Variabel	Definisi Operasional
2.	Konflik	Konflik adalah interaksi sosial antar satu pihak dengan pihak lain (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Hal ini mungkin terjadi karena adanya perbedaan kepentingan.
3.	Resolusi konflik	Resolusi konflik adalah upaya penanganan sebab-sebab terjadinya permusuhan dan berusaha menyelesaikan permusuhan tersebut dengan membangun hubungan baru yang tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau aktor-aktor yang berselisih.

1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe atau jenis penelitian eksplanatif. Prasetyo dan Miftahul (2011: 41-44) menyebutkan bahwa penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab suatu kejadian atau gejala terjadi dan membuktikan adanya hubungan pengaruh- mempengaruhi, atau adanya hubungan sebab akibat.

Output dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan sebab akibat. Pada dasarnya di dalam penelitian eksplanatif sebenarnya sudah terkandung penelitian eksploratif dan deskriptif (Prasetyo & Lina, 2010). Penelitian eksplanatif menguraikan penyebab Kuwait berkepentingan untuk menyelesaikan konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini adalah tahun 2017-2019. Hal ini didasarkan pada dinamika konflik blokade Qatar oleh Arab Saudi yang terjadi pada rentang tahun 2017-2019. Aspek yang

juga akan dibahas adalah aspek ekonomi yang berkaitan dengan tindakan Kuwait yang berkontribusi dalam menyelesaikan konflik antara Qatar dan Arab Saudi.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi literatur, yaitu dengan menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal nasional maupun internasional, serta bahan-bahan lain yang mendukung dan berkaitan dengan topik penelitian termasuk media massa seperti internet, koran serta majalah.

1.7.6 Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif (Siyoto & Sodik, 2015).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya untuk memperjelas makna data penelitian dengan cara mengumpulkan data menurut klasifikasi tertentu. Proses analisa data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut (Siyoto & Sodik, 2015):

a. Reduksi Data

Mereduksi data data berarti merangkum, memilih yang utama, memfokuskan pada yang paling penting, dan menghilangkan yang tidak perlu. Reduksi data dapat dicapai dengan melakukan operasi abstraksi. Abstraksi adalah upaya untuk membuat ringkasan inti, proses, dan pernyataan yang perlu dipertahankan dalam data penelitian. Dengan kata lain, proses reduksi data ini dilakukan secara terus menerus karena peneliti melakukan penelitian untuk menghasilkan anotasi kunci dari data yang diperoleh.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan supaya dapat melihat gambaran besar

atau bagian tertentu dari gambaran besar tersebut. Pada titik ini, peneliti berusaha untuk mengklasifikasikan dan menyajikan data berdasarkan topik.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis. Pada bagian ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Kegiatan ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan penyebab Kuwait berkepentingan untuk menyelesaikan konflik antara Qatar dengan Arab Saudi.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I akan menguraikan rancangan garis besar penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, dan metode penelitian.
- BAB II akan menguraikan dinamika hubungan antara Qatar dengan Arab Saudi. Pada bagian ini juga menguraikan kronologi terjadinya konflik blokade Qatar oleh Arab Saudi serta faktor-faktor yang memicu terjadinya konflik tersebut.
- BAB III akan menguraikan pembuktian hipotesis mengenai dugaan penyebab Kuwait berkepentingan untuk berkontribusi dalam upaya resolusi konflik blokade Qatar oleh Arab Saudi.
- BAB IV akan menyajikan kesimpulan dan saran.